

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Partisipasi masyarakat ialah keterlibatan, keikutsertaan masyarakat umum dalam pemecahan berbagai macam persoalan. Dapat pula berarti menjadikan masyarakat umum sebagai motor penggerak dalam penyelesaian berbagai persoalan. Partisipasi masyarakat seringkali dikaitkan dalam konteks pembangunan, baik dalam lingkup desa, kota hingga nasional. Partisipasi masyarakat menurut Nugroho (2020), dapat didefinisikan sebagai keterlibatan orang/masyarakat dalam proyek/kegiatan untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Sejalan dengan pemikiran sebelumnya, menurut Idajati et al, (2016) dalam Putri dan Muktiali, (2018) partisipasi masyarakat mengandung makna keikutsertaan pembangunan, mulai dari melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah.

Definisi partisipasi masyarakat juga dijelaskan menurut Rodliyah (2013) partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat 1 tentang Desa, yakni dalam perencanaan pembangunan desa, penyelenggaraannya harus

mengikutsertakan masyarakat. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Menurut Soeharto (2015) masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Dijelaskan juga pada Pasal 82 Ayat masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat atau partisipasi warga adalah proses ketika warga, sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka (Sumarto & Hetifa, 2003).

Istilah partisipasi sering diartikan dalam kaitannya dengan pembangunan sebagai pembangunan masyarakat yang mandiri, perwakilan, mobilitas sosial, pembagian sosial yang merata terhadap hasil-hasil pembangunan, penetapan kelembagaan khusus, demokrasi politik dan sosial, reformasi sosial, atau bahkan yang disebut revolusi rakyat. Menurut Winarto (2003) masyarakat mau bergerak untuk ikut berpartisipasi jika adanya: Pertama, partisipasi yang dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan. Kedua, partisipasi itu mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan. Ketiga, manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat. Keempat, dalam proses partisipasi itu apakah akan dijamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat.

Salah satu badan usaha yang berdiri karena adanya partisipasi masyarakat adalah BUMDesa, BUMDesa merupakan usaha desa yang bercirikan

kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah desa, bukan hanya dimiliki oleh masyarakat, bukan pula hanya dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik pemerintah desa dan masyarakat (Sutoro 2014). BUMDesa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDesa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. BUMDesa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDesa dibentuk untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan usaha ini dibentuk untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, dan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan desa, BUMDesa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

Dalam mengukur partisipasi masyarakat menggunakan beberapa indikator yaitu adanya kontribusi dimana dalam BUMDesa ini kontribusi masyarakat untuk berpartisipasi masih kurang yang disebabkan oleh sibuknya kegiatan masyarakat di bidang pertanian serta pekerjaan lainnya, adanya pengorganisasian dimana dalam BUMDesa pelaksanaan program kerja baru

BUMDesa tanpa melibatkan masyarakat sebagai anggota BUMDesa, peran masyarakat dalam BUMDesa ini peran masyarakat masih kurang dalam ikut memberikan masukan terkait program kerja BUMDesa, motivasi masyarakat dalam BUMDesa ini masyarakat kurang termotivasi untuk menyukseskan program kerja BUMDesa, dan tanggung jawab masyarakat dalam BUMDesa ini masih kurang bertanggungjawab terhadap program kerja BUMDesa.

Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor internal yang berupa sikap dan pengetahuan dan faktor eksternal yang berupa informasi. Faktor lain yang juga mempengaruhi partisipasi masyarakat dijelaskan oleh *grand theory* yang bernama *teory stakeholder* yang mengukur tentang sikap, pengetahuan, dan informasi. Organisasi atau perusahaan tentunya tidak dapat berdiri sendiri, pasti berhubungan dengan banyak pihak yang di sebut *stakeholder*. Definisi *stakeholder* adalah semua pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan baik yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi atau bersifat langsung maupun tidak langsung (Hidayat, 2017).

Sikap Menurut Notoatmodjo (2012) sikap adalah respons tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu, yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut (Berkowitz, 2013). Sikap merupakan perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku yang relatif menetap.

Pengetahuan individu tentang suatu objek mengandung dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif. Adanya aspek positif dan aspek negatif tersebut dapat menentukan sikap individu dalam berperilaku dan jika lebih banyak aspek

dan objek positif yang diketahui dapat menimbulkan perilaku positif terhadap objek tertentu (Sinaga, 2021). Pengetahuan (*knowledge*) juga merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra, yakni: indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh mata dan telinga.

Informasi adalah kumpulan data yang terstruktur dan yang disampaikan seseorang kepada orang lain, sehingga bermakna bagi orang tersebut. Informasi yang di peroleh dari berbagai sumber akan mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Seseorang banyak memperoleh informasi maka ia cenderung mempunyai pengetahuan yang luas. Semakin sering orang membaca, pengetahuan akan lebih baik daripada hanya sekedar mendengar atau melihat saja (Notoatmodjo & Soekidjo, 2003).

BUMDesa merupakan salah satu badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa. Dalam hal ini Desa berperan penting bagi kesejahteraan masyarakatnya dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Desa, menurut definisi "*universal*", biasa disebut dengan kota atau kabupaten permukiman di area perdesaan. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan dalam pemerintahan kabupaten, yang dipimpin oleh kepala desa. Desa merupakan salah satu tempat yang potensial bagi pertumbuhan perekonomian yang berbasis kerakyatan. Di desa memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan dan banyak sumber daya alam yang tersedia. Pemerintah menyadari akan potensi desa yang begitu besar, maka dari itu pemerintah menerbitkan sebuah kebijakan yaitu Otonomi Daerah tujuannya agar daerah

memanfaatkan dan mengembangkan wilayahnya terutama mengembangkan perekonomiannya. Pengertian desa menurut Rifhi Siddiq, desa adalah kawasan dengan kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang homogen, mata pencaharian di sektor pertanian, serta interaksi dengan daerah lain di sekitarnya. Sedangkan pengertian desa menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu badan hukum tempat tinggal sekelompok masyarakat yang berpemerintahan sendiri. Pengertian desa menurut undang-undang adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1, Desa atau yang sering disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam negara kesatuan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan melakukan pembangunan desa menjalankan suatu program pemerintahan dengan menyediakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang dimana nantinya bisa memberikan peluang kerja bagi warga desa yang membutuhkan pekerjaan serta menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat setempat terhadap perkembangan desanya. Menciptakan suatu peran dan partisipasi masyarakat untuk ikut serta menyukseskan adanya pembangunan desa BUMDesa. BUMDesa adalah sebuah lembaga di desa yang menjalankan fungsi pengelolaan potensi dan aset desa, serta sebagai penyedia layanan usaha bagi masyarakat desa. BUMDesa merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan beragam jenis potensi. Potensi utama dari adanya pendayagunaan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka.

Pemberdayaan masyarakat di Desa yang mencakup pembangunan di segala aspek kehidupan masyarakat. Dimana nantinya program-program kerja yang akan dilakukan dalam pembangunan desa seharusnya menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat Desa. Karena itu, maka hendaknya masyarakat ikut terlibat dalam proses pemberdayaan. Dimana pembangunan desa bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat Desa. Pendirian badan usaha ini harus disertai dengan penguatan kapasitas dan dukungan dari pemerintah (kebijakan) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini adalah lembaga ekonomi yang baru beroperasi sehingga membutuhkan dukungan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. BUMDesa dalam melaksanakan kegiatannya dikelola oleh desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi berupa simpan-pinjam. Jika lembaga tersebut bekerja dengan baik dan didukung kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi pedesaan akan tergerak kearah yang lebih baik dan berkembang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya BUMDesa sangat diharapkan dapat menjadi upaya sebagai penguatan ekonomi pedesaan. Untuk mencapai suatu kondisi yang diharapkan maka perlu adanya langkah strategi agar dapat mengoptimalkan potensi dan kebutuhan pasar serta perlunya penyusunan desain lembaga tersebut kedalam perencanaan.

Perlu kita sadari dimana kehidupan bangsa ini saling ketergantungan satu sama lainnya dalam menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh. Maka dari itu untuk menyikapi hal tersebut diharapkan keterlibatan dari semua aspek yang

bersifat positif serta saling mendukung terciptanya kesejahteraan yang menyeluruh yang salah satunya dalam bidang pembangunan. Peranan pemerintah pada masa ini lebih diarahkan untuk menciptakan aparatur yang efisien, efektif bersih, dan beribawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa, dan Negara.

Upaya penguatan ekonomi pedesaan dengan pendirian BUMDesa juga dilakukan di salah satu desa yaitu Desa Timuhun. Desa Timuhun adalah salah satu Desa dari 13 Desa yang ada di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang memiliki luas  $45,73 \text{ km}^2$ , dan desa timuhun sendiri memiliki luas  $3,75 \text{ km}^2$  dengan mayoritas mata pencaharian atau pendapatan penduduk adalah bertani, buruh serabutan, usaha kecil, karyawan swasta, dan pegawai negeri sipil. Seiring dengan perkembangan program pembangunan pemerintah provinsi bali, perhatian pemerintah terhadap masyarakat pedesaan dalam memberikan peluang meningkatkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam program-program meningkatnya perhatian pemerintah terhadap adanya masyarakat miskin sampai ketingkat pedesaan serta program pengentasan kemiskinan yang sangat dibutuhkan dan sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu wilayah maupun terhadap masyarakat itu sendiri.

Sesuai dengan hasil musyawarah, pada tahun 2016 didirikannya BUMDesa di Desa Timuhun yang diberinama “BUMDesa Tri Jenaka” yang bergerak di bidang simpan pinjam dan juga pertokoan. Sumber modal yang digunakan BUMDesa yaitu berasal dari bantuan pemerintah daerah, simpanan pokok,

simpanan wajib, simpanan sukarela, dan lain-lain. Didirikannya BUMDesa Tri Jenaka ini bertujuan untuk menguatkan pengelolaan keuangan, meningkatkan pengelolaan potensi dengan memanfaatkan potensi dan juga sumber daya alam di desa seperti di bidang pertanian, bidang peternakan maupun di bidang industri serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di desa sehingga dapat mensejahterahkan masyarakat desa.

Berikut ini jumlah penduduk dan partisipasi masyarakat di Desa Timuhun Kecamatan Banjarangkan yang dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah penduduk dan partisipasi masyarakat Desa Timuhun**

<b>Banjar Dinas</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Jumlah Partisipasi Masyarakat</b>
Banjar Kawan	1140	471
Banjar Tengah	1122	462
Banjar Kaleran	1153	452
<b>Total</b>	<b>3415</b>	<b>1385</b>

(Sumber : Kantor Desa Timuhun)

Berdasarkan data di atas memperlihatkan jumlah penduduk dari 3 dusun di Desa Timuhun memiliki total sebanyak 3415 penduduk dari semua jenis kelamin dengan jumlah partisipasi masyarakatnya hanya 1385 maka dari data tersebut jumlah partisipasi masyarakat di Desa Timuhun dalam tingkat rendah yaitu 429 untuk yang meminjam di BUMDesa, 53 masyarakat yang tercatat menabung dimana setiap bulannya langsung ditarik, 900 masyarakat yang berbelanja di pertokoan, dan 3 masyarakat yang menjual hasil pertanian, dengan jumlah petani

405. Usia masyarakat yang berpartisipasi mulai dari umur 17 - >45 tahun baik itu yang melakukan simpan pinjam dan juga berbelanja di pertokoan. Dengan jumlah partisipasi masyarakat di masing-masing banjar juga masih dikatakan rendah, yaitu pada banjar Kawan hanya 471 masyarakat yang berpartisipasi baik itu pada simpan pinjam, petokoan, dan juga hasil tani, banjar Tengah sebanyak 462 warga, dan banjar Kaleran 452 warga. Maka dari fenomena tersebut dapat dikatakan BUMDesa masih belum optimal perkembangannya karena kurangnya partisipasi masyarakat terhadap penerapan program kerja BUMDesa yang dimana dipengaruhi oleh sikap masyarakat yang kurang peduli hanya mementingkan perkembangan usaha ekonomi sendiri, pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya ada BUMDesa masih kurang memahami apa saja manfaat serta pentingnya pendirian BUMDesa untuk perkembangan ekonomi desa, dan dalam mencari informasi terkait apa saja yang dijalankan pada BUMDesa masih kurang belum diketahui dengan bijak. Sehingga rendahnya partisipasi masyarakat pada program yang ada di BUMDesa itu penting untuk diteliti, tujuannya agar partisipasi masyarakat bisa lebih ditingkatkan lagi.

Berdasarkan data di atas dari potensi jumlah penduduk tersebut belum mampu berkontribusi secara optimal guna menyukseskan program BUMDes Tri Jenaka selama ini. Karena masyarakat kurang dalam bersikap, pengetahuan masyarakat tentang BUMDesa masih kurang, dan informasi yang diterima masyarakat juga masih rendah. Faktor penyebab hal tersebut yakni karena sebagian besar masyarakat di desa timuhun sibuk bekerja sebagai petani dan pekerjaan lainnya dan faktor penyebab lainnya dari sikap masyarakat yang kurang peduli, pengetahuan masyarakat yang kurang

tentang BUMDesa, dan juga kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa keikutsertaan dalam program BUMDes itu penting. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun komunikasi antara pemerintah desa atau pengelola BUMDes dengan masyarakat. Pengelola BUMDes Tri Jenaka juga diharapkan mampu menjalankan tugas pokok dan bekerja sama dengan masyarakat dalam rangka membangun dan memajukan desanya. Tujuan didirikannya BUMDes tersebut yakni guna memutus ketergantungan serta kebiasaan masyarakat dengan meminjam ke bank keliling yang justru akan merugikan karena terlibat dalam perputangan. Dengan demikian, tugas pengelola BUMDes tersebut menjadi fundamental karena dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggunakan unit-unit usahanya dalam menjalankan bisnis.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang hal yang dijelaskan menurut Ryanti Tiballa (2017) yang melaporkan hasil studi kasus di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur bahwa untuk mencapai tujuan program BUMDes, peran serta masyarakat menjadi aspek fundamental agar program yang telah dirancang dapat dijalankan dengan sukses. Erika Pratiwi (2019) pada penelitiannya yang menjelaskan tentang studi kasus di Jinengdalem Kabupaten Singaraja membahas Persepsi Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, dan Program Kerja BUMDesa bahwa untuk mencapai tujuan program BUMDesa, persepsi masyarakat, partisipasi, dan program kerja BUMDesa dapat berjalan sesuai dengan tujuan serta mencapai kesuksesan perlunya dukungan serta kerja sama yang baik dari masyarakat dalam mengelola BUMDesa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesuksesan program BUMDes yang telah direncanakan tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat secara aktif didalam penyelenggaraan BUMDes tersebut. Atas dasar tersebut bahwa BUMDes tidak bisa terselenggara dengan optimal apabila masyarakat di desa tersebut kurang partisipatif. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai korelasi **“Pengaruh Sikap, Pengetahuan dan Informasi Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Penerapan Program Kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Tri Jenaka di Desa Timuhun”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka di lakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan data yang diperoleh dari BUMDesa, dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dari usia 17- >45 tahun di Desa Timuhun masih dikatan rendah yaitu 429 atau 12,6% untuk yang meminjam di BUMDesa, 53 atau 1,6% masyarakat yang menabung, 900 atau 26% masyarakat yang berbelanja di pertokoan. Dari fenomena tersebut maka BUMDesa masih belum bisa berkembang karena kurangnya partisipasi masyarakat terhadap adanya program kerja BUMDesa. Partisipasi masyarakat yang rendah mengakibatkan kurangnya kontribusi dari masyarakat. Dilihat dari kurangnya sikap peduli, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BUMDesa, dan juga kurangnya informasi yang didapat masyarakat terkait BUMDesa.
- 2) Dilihat dari kondisi keanggotaan pada BUMDesa yang masih kurang maksimal dimana dengan jumlah pengelola BUMDesa 11 orang, dalam hal

ini pengelola BUMDesa sangat berperan penting dalam menyukseskan program-program yang ada di BUMDesa dengan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi sebagai anggota BUMDesa baik itu dengan meningkatkan sikap, memberikan pengetahuan atau memberikan sosialisasi terkait BUMDesa, dan juga cara menyampaikan informasi juga harus dilakukan dengan baik dan benar. Rapat yang dilakukan pengelola BUMDesa tanpa melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui semua informasi tentang BUMDesa.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Banyak hal yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap penerapan program kerja badan usaha milik desa (BUMDesa). berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti memberikan pembatasan dari ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan. Peneliti membatasi permasalahan pada pengaruh sikap, pengetahuan, dan informasi terhadap partisipasi masyarakat dalam penerapan program kerja badan usaha milik desa (BUMDesa) Tri Jenaka di Desa Timuhun. Karena rendahnya partisipasi masyarakat sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan guna untuk mengetahui seberapa masyarakat memeberikan partisipasinya dalam penerapan program kerja BUMDesa Tri Jenaka di Desa Timuhun dengan tujuan agar partisipasi masyakat bisa lebih ditingkatkan lagi.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan di atas maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaruh sikap terhadap partisipasi masyarakat pada penerapan program kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Tri Jenaka di Desa Timuhun?
- 2) Bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap partisipasi masyarakat pada penerapan program kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Tri Jenaka di Desa Timuhun?
- 3) Bagaimana pengaruh informasi terhadap partisipasi masyarakat pada penerapan program kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Tri Jenaka di Desa Timuhun?
- 4) Bagaimana pengaruh sikap, pengetahuan dan informasi terhadap partisipasi masyarakat pada penerapan program kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Tri Jenaka di Desa Timuhun?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Tri Jenaka Di Desa Timuhun untuk mengetahui:

- 1) Pengaruh sikap terhadap partisipasi masyarakat pada penerapan program kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Tri Jenaka di Desa Timuhun.
- 2) Pengaruh pengetahuan terhadap partisipasi masyarakat pada penerapan program kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Tri Jenaka di Desa Timuhun.

- 3) Pengaruh informasi terhadap partisipasi masyarakat pada penerapan program kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Tri Jenaka di Desa Timuhun.
- 4) Pengaruh sikap, pengetahuan dan informasi terhadap partisipasi masyarakat pada penerapan program kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Tri Jenaka di Desa Timuhun.

## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini besar harapan saya sebagai penulis dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi khalayak umum, manfaat dalam pengembangan ilmu ekonomi, termasuk mengenai pemahaman tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

### 2) Manfaat Praktis

#### (1) Bagi Mahasiswa

Manfaat hasil penelitian ini bagi mahasiswa, sangat besar harapan saya agar apa yang saya buat ini bisa menambah pengetahuan serta wawasan dalam melakukan penelitian partisipasi masyarakat terhadap penerapan program kerja badan usaha milik desa (BUMDesa). Serta besar harapan saya penelitian yang saya buat ini bisa lebih diperluas lagi jika digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya oleh mahasiswa.

#### (2) Bagi BUMDesa Trijenaka Timuhun

Manfaat hasil penelitian ini bagi BUMDesa Trijenaka Timuhun, besar harapan saya dimana hasil penelitian ini bisa bermanfaat dengan sebaik-baiknya, agar aparat desa dan juga pengurus BUMDesa bisa lebih jeli dan teliti dalam mencari serta melibatkan masyarakatnya untuk ikut serta berpartisipasi terhadap penerapan program kerja BUMDesa Tri Jenaka di Desa Timuhun ini.

(3) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Manfaat hasil penelitian ini bagi undiksha, besar harapan saya apa yang saya buat ini semoga bisa menjadi acuan mahasiswa mahasiswi undiksha untuk dijadikan refrensi yang bisa membantu dalam penyusunan skripsi.

